

Template Usulan Rencana Aksi OGI 2023-2024

Partisipasi dan Pelibatan Perempuan dan Kelompok Marginal yang Bermakna

Judul Komitmen:	
Memperkuat Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Proses Pembangunan dengan Perspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)	
Organisasi Masyarakat Sipil Pengusul: Institut KAPAL Perempuan	
Periode Implementasi Rencana Aksi: Januari 2023 – Desember 2024	
Kementerian/Lembaga Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Bappenas 4. Kementerian Desa 5. Pemerintah daerah di wilayah kerja Institut KAPAL Perempuan di 9 provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Bali, Jawa Timur, Sumatera Barat, Maluku Utara, Banten)
Deskripsi Komitmen	
Apa latar belakang permasalahan publik yang akan diselesaikan dalam komitmen ini?	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang tersedianya ruang partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam pengambilan keputusan • Budaya patriarki masih kuat sehingga menghambat perempuan dan kelompok marginal terlibat dalam pengambilan keputusan • Kebijakan pengarusutamaan gender belum diimplementasikan secara penuh • Kurang tersedia anggaran yang mendukung partisipasi perempuan dan kelompok marginal • Belum adanya undang-undang yang menjadi payung hukum untuk memastikan partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam pengambilan keputusan pembangunan.
Apa bentuk komitmennya?	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat kapasitas dan kelompok marginal agar dapat masuk dalam ruang-ruang pengambilan keputusan pembangunan • Melakukan penyadaran publik untuk memperkecil hambatan budaya patriarki agar publik memberikan dukungan terhadap perempuan dan kelompok marginal berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pembangunan • Mendorong pemerintah nasional untuk memastikan pemerintah daerah menyediakan kebijakan, program dan anggaran untuk mewujudkan partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam pengambilan keputusan

	<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong terbitnya Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender.
Bagaimana komitmen tersebut dapat menyelesaikan permasalahan publik?	Komitmen ini menggunakan pendekatan komprehensif yang menjangkau empat aspek penting yaitu memperkuat kapasitas perempuan dan kelompok marginal, penyadaran publik, advokasi kebijakan dan anggaran, serta mendorong terbitnya undang-undang yang menjadi payung hukum partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam pengambilan keputusan.
Mengapa komitmen tersebut relevan terhadap nilai-nilai Keterbukaan Pemerintah?	<p>Nilai-nilai keterbukaan pemerintah yaitu partisipasi, akuntabilitas, transparansi, inovasi, dan inklusif. Mengapa komitmen ini penting dan relevan yaitu karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komitmen ini mendorong implementasi dari partisipasi khususnya partisipasi perempuan dan kelompok marginal • Dalam upaya mewujudkan partisipasi mengandung prasyarat keterbukaan pemerintah untuk berkolaborasi • Dengan adanya partisipasi perempuan dan kelompok marginal dapat berkontribusi pada penerapan nilai inklusi, akuntabilitas dan transparansi. • Komitmen ini didasarkan pada pengalaman Institut KAPAL Perempuan bekerja sama dengan organisasi dan pemerintah lokal dalam mengembangkan inisiatif Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) khusus perempuan dan kelompok marginal. KAPAL Perempuan bekerja sama dengan organisasi dan pemerintah lokal (Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara, NTB) untuk membuat Musrenbang Perempuan ditingkat kabupaten. Musrenbang perempuan ini dilakukan sejak tahun 2014 sampai sekarang. Inisiatif ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan monev pembangunan melalui Musrenbang Perempuan. Musrenbang Perempuan ini berperan dalam mengisi kesenjangan musrenbang reguler yang selama ini cenderung belum memperhatikan dan bahkan meninggalkan kepentingan perempuan sehingga menghambat upaya kesetaraan gender terjadi. Musrenbang Perempuan juga merupakan upaya melibatkan kelompok yang selama ini tertinggal dalam pembangunan dan ini penting menjadi perhatian karena SDGs mengedepankan tidak satu orang pun ditinggalkan atau <i>No One Left Behind</i>.
Kesesuaian dengan RPJMN/RKP dan SDGs	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN 2020-2024, khususnya agenda <i>ketiga</i>: Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, yang dititikberatkan pada peningkatan kualitas anak, perempuan dan anak muda. Peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok marginal adalah bagian dari

	<p>mendorong peningkatan kualitas SDM terutama dalam keterlibatannya di proses pembangunan.</p> <p>Dalam RPJMN 2020-2024 pada penjelasan “Menuju Indonesia 2025” di bagian sosial dan budaya yaitu pada tahun 2025, diharapkan kualitas hidup perempuan semakin membaik, diikuti dengan meningkatnya kesetaraan gender di seluruh bidang pembangunan. Selanjutnya, strategi pengarusutamaan gender diharapkan dapat menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi seluruh kelompok, baik laki-laki maupun perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sesuai dengan prinsip-prinsip SDGs yaitu universal, integrasi dan inklusif untuk memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang ditinggalkan atau “No One Left Behind”. Termasuk memastikan partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam mewujudkan pencapaian SDGs untuk mendukung pembangunan yang adil gender dan inklusif. • Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan public. • Sesuai dengan PP Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. • Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini mewajibkan setiap kementerian/Lembaga untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di seluruh sektor pembangunan di semua tingkat pemerintahan. 	
Informasi Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • RAN SDGs 2021 -2024 • RAD SDGs 2021-2024 	
Milestone		
Indikator capaian	Tanggal Mulai	Tanggal Berakhir
1. Audiensi dengan kementerian nasional terkait	Januari 2023	Desember 2024
2. Audiensi dengan pemerintah daerah di wilayah kerja Institut KAPAL Perempuan	Januari 2023	Desember 2024
3. Pendidikan publik tentang pentingnya partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam	Januari 2023	Desember 2023

pengambilan keputusan proses pembangunan		
4. Penguatan kapasitas perempuan dan kelompok marginal	Januari 2023	Desember 2024
5. Terlibat advokasi RUU KKG bersama jaringan	Januari 2023	Desember 2024
Informasi Kontak		
Kementerian Pelaksana	1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA)	
Nama PIC KL	Ibu Lenny N. Rosalin, S. E., M.Sc., M.Fin.	
Departemen/ Jabatan	Kedeputian Bidang Kesetaraan Gender/ Deputi	
Email kontak	lennyrosalin@gmail.com	
K/L terkait	<ul style="list-style-type: none"> 2. Kementerian Dalam Negeri 3. Kementerian Desa 4. Bappenas 5. Pemerintah daerah wilayah program Institut KAPAL Perempuan di 9 provinsi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, NTB, NTT, Bali, Jawa Timur, Sumatera Barat, Maluku Utara, Banten). 	
Organisasi Masyarakat Sipil Kolaborator	Institut KAPAL Perempuan	
Potensi Mitra Pembangunan (Donor)	Self Funding	